



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah
Kota Tebing Tinggi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

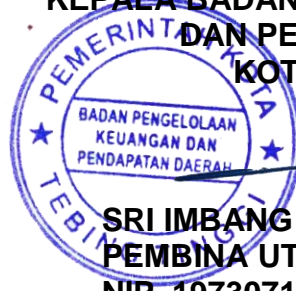
Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**



**SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730719 199311 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	12
1.4. Landasan Hukum	13
1.5. Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	16
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja	25
3.2. Realisasi Anggaran	35
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB IV PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga sebagai wujud komitmen Perangkat Daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, dimana tertuang dalam Pasal 72 disebutkan:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. 1 (satu) Sub Koordinator.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 3. 1 (satu) Sub Koordinator.

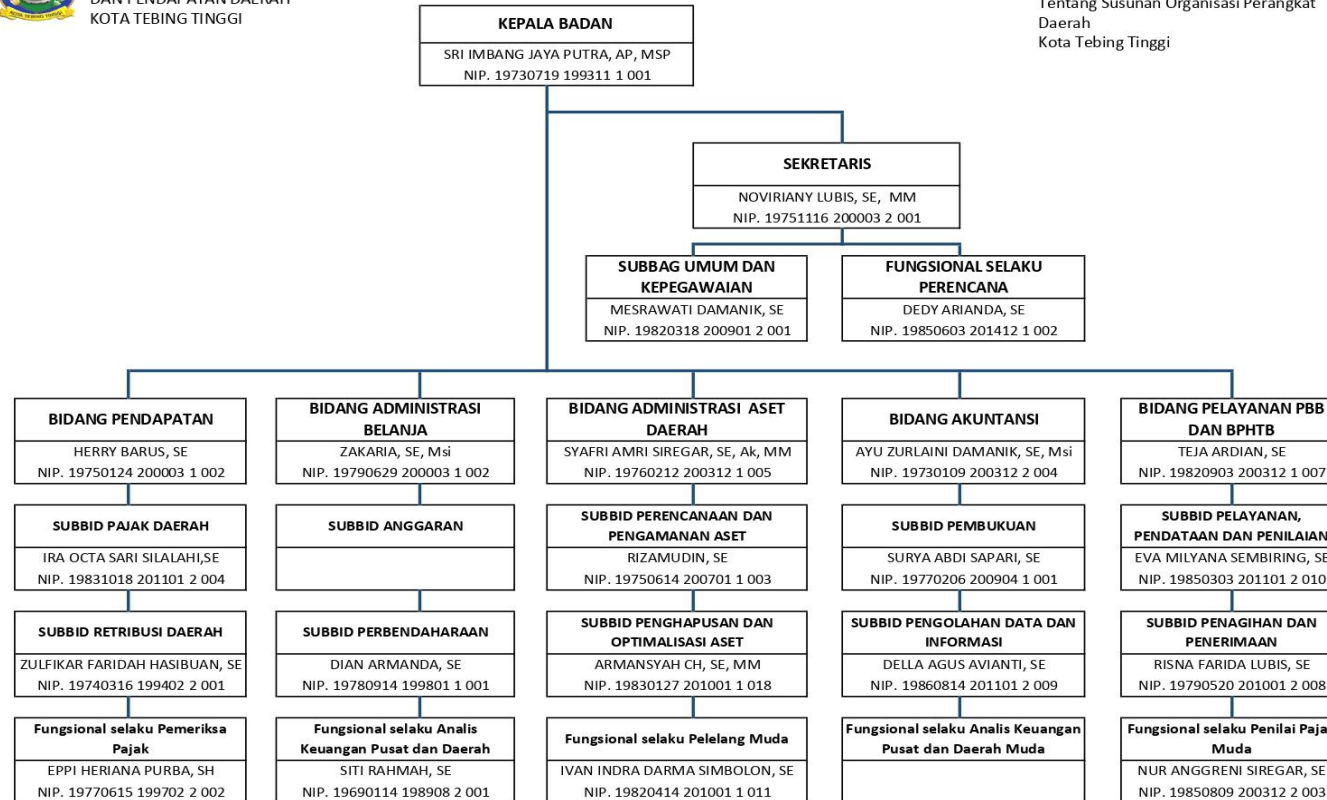
- d. Bidang Administrasi Belanja, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 3. 1 (satu) Sub Koordinator.
- e. Bidang Administrasi Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset; dan
 - 3. 1 (satu) Sub Koordinator.
- f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. 1 (satu) Sub Koordinator.
- g. Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan dan Penilaian;
 - 2. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan; dan
 - 3. 1 (satu) Sub Koordinator.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi :



BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing
Tinggi Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah
Kota Tebing Tinggi



Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi didukung aparatur daerah sebanyak 110 orang, terdiri dari PNS sebanyak 63 orang dan Tenaga Honorer, Kontrak dan Tenaga Outsourcing sebanyak 37 orang, baik untuk tugas dibidang Administrasi dan Tenaga Operator maupun Petugas Lapangan.

NO	NAMA/NIP	GOL.RUANG/TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	
				STRUKTURAL	ESSELON
1.	SRI IMBANG JAYAPUTRA AP, MSP 19730719 199311 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c) / 01-04-2022	S2	KEPALA BADAN	II
2.	NOVIRIANY LUBIS, SE, MM 19751116 200003 2 001	Pembina Tk. I (IV/b) / 01-04-2022	S2	SEKRETARIS	III
3.	DEDY ARIANDA, SE 19850603 201412 1 002	Penata (III/c) / 01-04-2022	S1	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA	
4.	MESRAWATI DAMANIK, SE 19820318 200901 2 001	Penata (III/c) / 01-04-2020	S1	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
5.	HERRY BARUS, SE 19750124 200003 1 002	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2016	S1	KABID PENDAPATAN	III
6.	IRA OCTA SARI SILALAH, SE 19831018 200101 2 004	Penata (III/c) / 01-04-2019	S1	KASUBBID PAJAK DAERAH	IV
7.	EPPI HERIANA PURBA, SH 19770615 199702 2 002	Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2018	S1	PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK	
8.	ZULFIKAR FARIDA HASIBUAN, SE 19740316 199402 2 001	Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2014	S1	KASUBBID RETRIBUSI DAERAH	IV
9.	TEJA ARDIAN, SE 19820903 200312 1 007	Pembina (IV/a) / 01-04-2022	S1	KABID PELAYANAN PBB DAN BPHTB	III
10.	NUR ANGGRENI SIREGAR, SE 19850809 200312 2 003	Penata (III/c) / 01-04-2019	S1	PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PAJAK	
11.	EVA MILYANA SEMBIRING, SE 19850303 201101 2 010	Penata (III/c) / 01-04-2019	S1	KASUBBID PELAYANAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN	IV
12.	RISNA FARIDA LUBIS, SE 19790520 201001 2 008	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-10-2020	S1	KASUBBID PENAGIHAN DAN PENERIMAAN	IV
13.	ZAKARIA, SE., M.Si 19790629 200003 1 002	Pembina (IV/a) / 01-04-2020	S2	KABID ADMINISTRASI BELANJA	III
14.	SITI RAHMAH, SE 19690114 198908 2 001	Penata Tk. I (III/d) / 01-10-2017	S1	PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
15.	DIAN ARMANDA, SE 19780914 199801 1 001	Penata Tk. I (III/d) / 01-10-2022	S1	KASUBBID PERBENDAHARAAN	IV
16.	AYU ZURLAINI DAMANIK, SE., M.SI 19730109 200312 2004	Penata Tk. I (III/d) / 01-04-2020	S2	KABID AKUNTANSI	III
17.	DELLA AGUS AVIANTI, SE 19860814 201101 2 009	Penata (III/c) / 01-10-2018	S1	KASUBBID PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	IV
18.	SURYA ABDI SAPARI, SE 19770206 200904 1 001	Penata Tk. I (III/d) / 01-10-2021	S1	KASUBBID PEMBUKUAN	IV
19.	SYAFRI AMRI SIREGAR, SE. Ak., MM 19760212 200312 1 005	Pembina (IV/a) / 01-04-2021	S2	KABID ADMINISTRASI ASET DAERAH	III
20.	IVAN INDRA DARMA SIMBOLON, SE 19820414 201001 1 011	Penata (III/c) / 01-04-2018	S1	PEJABAT FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG	
21.	RIZAMUDDIN, SE 19750614 200701 1 003	Penata (III/c) / 01-04-2021	S1	KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN ASET	IV
22.	ARMANSYAH CH, SE., MM 19830127 201001 1 018	Penata Tk.I (III/d) / 01-10-2018	S2	KASUBBID PENGHAPUSAN DAN OPTIMALISASI ASET	IV
23.	MUHAMMAD FAHRUL, SE 19891015 201903 1 003	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	S1	-	-
24.	DIANTRI SUSILAWATI, SE 19730309 200701 2 003	Penata (III/c) / 01-04-2017	S1	-	-
25.	JULIANTI, A.Md 19840102 201001 2 030	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	D3	-	-

NO	NAMA/NIP	GOL.RUANG/TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	
				STRUKTURAL	ESSELON
26.	ARNETA MARTCIESA, SE 19900331 201503 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2019	S1	-	-
27.	SRI MULIYANI 19781106 200701 2 002	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	SMA	-	-
28.	DITA RAHMADANI, SE 19890419 201101 2 003	Penata Muda (III/a) / 01-04-2019	S1	-	-
29.	AMBARANTA FERNANDO, A.Md 19841113 201101 1 004	Penata Muda (III/a)/01-04-2019	D3	-	-
30.	ISMAIL HARUN 19790712 200312 1 004	Penata Muda (III/a) / 01-04-2020	S1	-	-
31.	AGUS SUBASTIAN POHAN, A. Md 19880816 201903 1 005	Pengatur (II/c)/ 01-04-2019	D3	-	-
32.	SYAFRIZAL LUBIS 19690518 200701 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2020	STM	-	-
33.	RIDWAN NASUTION 19720317 200801 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2020	SMA	-	-
34.	ZURIAH 19740302 200701 2 005	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	SMA	-	-
35.	TJITRA MARISKA 19861001 201212 2 003	Pengatur (II/c)/ 01-04-2021	SMK	-	-
36.	WENNY AGUSTIN SEMBIRING, S. Pn 19950829 201903 2 009	Penata Muda (III a)/ 01-04-2019	S1	-	-
37.	ILMI FADILA, A. Md 19890509 201503 2 004	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
38.	MADE IRAWAN 19851118 200312 1 001	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2021	SMA	-	-
39.	ARDILLA FADLI, SE 19861212 201503 1 005	Penata Muda (III/a) / 01-04-2022	S1	-	-
40.	RAPI DUAN NIKO HARIANJA, S. Pn 19950829 201903 1 001	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2019	S1	-	-
41.	SUGENG PRANOTO, A. Md 19810219 201001 1 013	Penata Muda TK I (III/b)/ 01-04-2022	D3	-	-
42.	WAHYU RAMADHAN, A. Md 19860531 200904 1 002	Penata Muda (III/a) /01-04-2019	D3	-	-
43.	NURLINA 19660725 200701 2 003	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
44.	MULIANI, SE 19660706 200604 2 005	Penata (III/c) / 01- 04-2021	S1	-	-
45.	ZAINAL ABIDIN, SE 19750223 200604 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-04-2019	S1	-	-
46.	AIDIL RAHMAD DALIMUNTHE, S.STP 19970419 202008 1 001	Penata Muda (III/a)/ 01-08-2020	S1	-	-
47.	SUCI AZZURA KHAIRUNA, SE 19961120 201903 2 010	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2019	S1	-	-
48.	DWI PANJI MADRA SUANDANA, SE 19861124 201101 1 002	Penata (III/c) / 01-04-2022	S1	-	-
49.	HENDRA SUTianto 19710629 200901 1 003	Pengatur (II/c)/ 01-04-2021	SMA	-	-
50.	PAIMAN, SE 19710505 200701 1 012	Penata (III/c) / 01-10-2021	S1	-	-
51.	ISMA ARYANI 19830529 201212 2 001	Pengatur (II/c)/ 01-04-2021	D1	-	-
52.	MONIKA SIPAYUNG, A. Md 19890607 201503 2 006	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
53.	NURMALA SARI LUBIS, A.Md 19811007201412 2 001	Pengatur Tk. I (II/d)/ 01-04-2019	D3	-	-
54.	SRI WAHYUNI, SE 19830209 201001 2 006	Penata Muda TK.I (III/b)/ 01-10-2020	S1	-	-
55.	MANATAR PANDAPOTAN LUMBAN GAOL, A. Md 19811203 201001 1 017	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2019	D3	-	-
56.	HARY SAPTA POLIBRA 19860921 201212 1 002	Pengatur (II/c)/ 01-04-2021	STM	-	-

NO	NAMA/NIP	GOL.RUANG/TMT	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	
				STRUKTURAL	ESSELON
57.	NANDA SYAPUTRI, S.Ak 19960605 202203 2 004	Penata Muda (III/a)/ 01-03-2022	S1		
58.	AILIN FIDIA ASRI SIMA, SE 19960303 202203 2 007	Penata Muda (III/a)/ 01-03-2022	S1		
59.	MEIRINCE YASINTA SIREGAR, SE 19930512 202203 2 009	Penata Muda (III/a)/ 01-03-2022	S1		
60.	ERIKA FEBRINA BR SITEPU, SE 19900224 202203 2 002	Penata Muda (III/a)/ 01-03-2022	S1		
61.	JULI RATNA SARI, A.Md.Bns 19970730 202203 2 006	Pengatur (II/c)/ 01-03-2022	D3		
62.	MEGA L. SITUNGKIR, A.Md.Bns 19990710 202203 2 005	Pengatur (II/c)/ 01-03-2022	D3		
63.	SULISNANINGSIH,SE 19770212 200901 2 002	Penata (III/c)/ 01-04-2017	S1		

Sumber daya manusia/pegawai yang dimiliki dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 63 orang sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas, dengan rincian:

a. Pegawai menurut Jabatan (Eselon), adalah sebagai berikut :

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	5
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	1
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	9
6.	Pejabat Fungsional Muda	5
7.	Fungsional Umum/staf	41
	Jumlah	63

b. Pegawai menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pasca Sarjana (S2)	6
2.	Sarjana (S1)	36
3.	Diploma Tiga (D3)	12
4.	Diploma Satu (D1)	1
5.	SLTA	8
6.	SLTP	0
	Jumlah	63

c. Pegawai menurut golongan/pangkat adalah sebagai berikut:

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	3
4.	Penata Tk. I (III/d)	8
5.	Penata (III/c)	13
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
7.	Penata Muda (III/a)	17
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	8
9.	Pengatur (II/c)	7
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0
Jumlah		63

Fasilitas pendukung kerja yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi relatif dapat mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Baik	67	330.656.000
1.3.5.01.001.003.001	Agama Islam	Baik	2	320.000
1.3.5.02.001.001.003	Alat Kesenian Lain-lain	Baik	1	400.000
1.3.2.06.002.001.022	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Baik	1	21.620.000
1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	Baik	16	11.919.600
1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	Baik	10	41.786.000
1.3.2.05.001.004.029	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	Baik	2	8.150.000
1.3.2.08.003.009.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	Baik	1	1.200.000
1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Baik	84	20.994.250
1.3.2.03.003.001.137	alat ukur universal lainnya (dst)	Baik	90	136.260.000
1.3.2.06.001.001.001	Audio Mixing Console	Baik	1	4.800.000
1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	Baik	2	10.050.000
1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	4	2.462.195.684
1.3.3.01.001.002.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Baik	1	24.600.000
1.3.3.01.001.029.002	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Baik	1	20.493.000
1.3.3.01.001.033.005	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	Baik	1	139.527.692

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
1.3.5.01.001.001.004	Bibliografi, Katalog	Baik	1	50.000
1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	Baik	3	69.330.000
1.3.5.01.001.004.011	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	Baik	129	13.991.200
1.3.5.01.001.001.012	Buku Umum Lain-lain	Baik	25	2.697.000
1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	Baik	7	45.070.000
1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	Baik	2	5.074.000
1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	Baik	3	40.574.000
1.3.2.10.002.001.006	CPU (Peralatan Mainframe)	Baik	4	67.242.500
1.3.2.10.002.003.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Baik	4	13.960.000
1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Baik	17	16.502.690
1.3.2.05.002.006.067	DVD Player	Baik	1	700.000
1.3.5.01.001.004.004	Ekonomi	Baik	8	782.500
1.3.5.01.001.001.006	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Baik	4	870.300
1.3.2.05.002.006.006	Equalizer	Baik	1	3.300.000
1.3.2.05.002.004.007	Exhaust Fan	Baik	1	600.000
1.3.2.10.002.003.015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Baik	5	4.400.000
1.3.2.10.002.003.017	External/ Portable Hardisk	Baik	14	17.884.596
1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	Baik	1	3.000.000
1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	Baik	36	69.015.105
1.3.2.05.001.005.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Baik	2	4.700.000
1.3.2.05.001.004.022	Folding Container Box	Baik	39	13.261.300
1.3.2.02.002.001.002	Gerobak Dorong	Baik	2	1.000.000
1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	Baik	1	7.800.000
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	Baik	4	84.930.000
1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	Baik	3	19.570.000
1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	Baik	3	5.700.000
1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	Baik	3	3.750.000
1.3.5.01.001.004.005	Hukum	Baik	13	2.108.500
1.3.5.01.001.001.003	Ilmu Pengetahuan Umum	Baik	70	6.344.700
1.3.4.03.001.001.002	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	Baik	1	7.819.400
1.3.2.10.001.001.004	Internet	Baik	1	6.678.000
1.3.4.04.002.003.001	Jaringan listrik lainnya	Baik	4	24.572.870
1.3.2.02.001.001.002	Jeep	Baik	1	248.400.000
1.3.2.15.003.003.039	Kamera/Video dengan tempatnyaU/ Bawah Air (Sea & Sea)	Baik	1	9.770.000
1.3.2.10.002.003.009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1	500.000
1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Baik	4	3.125.000
1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	Baik	5	21.200.000
1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	Baik	15	1.824.375
1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Baik	91	98.920.000

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1	8.320.000
1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	6	10.842.000
1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	6	5.250.000
1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Baik	1	2.600.000
1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	Baik	50	65.011.000
1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	Baik	119	34.820.000
1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	Baik	6	28.860.000
1.3.2.05.003.006.004	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon II	Baik	1	10.350.000
1.3.2.05.003.006.005	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon III	Baik	1	4.900.000
1.3.2.10.002.003.014	LAN Card	Baik	4	4.420.000
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Baik	89	917.924.224
1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	Baik	2	27.825.000
1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	Baik	10	52.880.000
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	19	79.695.000
1.3.2.05.003.007.005	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Baik	1	2.398.000
1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	Baik	1	2.047.725
1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	Baik	1	2.970.000
1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Baik	37	199.219.000
1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	Baik	7	18.400.000
1.3.5.02.001.002.001	Lukisan Cat Air	Baik	1	300.000
1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	Baik	6	5.115.000
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Baik	65	101.665.546
1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	3	23.035.000
1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	7	27.549.000
1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	23	49.760.000
1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	Baik	12	24.540.000
1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	Baik	6	4.950.000
1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	Baik	2	19.880.000
1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	Baik	1	16.282.000
1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	Baik	1	1.280.100
1.3.2.05.002.003.004	Mesin Cuci	Baik	2	7.400.000
1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Baik	1	201.000
1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Baik	2	7.950.000
1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	Baik	1	2.370.000
1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Baik	2	2.150.000
1.3.2.05.001.002.012	Mesin Penghitung Uang	Baik	3	12.100.000
1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	Baik	2	4.720.000
1.3.2.05.002.006.014	Microphone	Baik	1	4.780.000
1.3.2.05.002.006.016	Microphone Table Stand	Baik	2	866.000

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wireless MIC	Baik	1	3.630.000
1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	12	1.992.757.625
1.3.2.10.002.004.004	Modem	Baik	9	2.474.000
1.3.2.10.002.003.002	Monitor	Baik	1	1.478.510
1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Baik	8	86.068.332
1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	Baik	4	59.849.348
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Baik	63	545.353.830
1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	Baik	5	19.250.000
1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	Baik	3	58.900.000
1.3.2.05.001.005.078	Papan Tulis	Baik	2	1.684.000
1.3.5.01.001.004.008	Pendidikan	Baik	9	766.000
1.3.5.01.001.005.003	Pengetahuan Bahasa Inggris	Baik	2	296.000
1.3.2.06.001.004.053	Peralatan Cetak lainnya	Baik	1	1.500.000
1.3.2.10.002.005.001	Peralatan Komputer lainnya	Baik	10	45.852.000
1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	12	224.104.230
1.3.2.03.002.011.011	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	Baik	2	16.000.000
1.3.2.05.001.005.021	Perforator Besar	Baik	2	122.766.000
1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	Baik	1	171.070.000
1.3.2.10.002.003.005	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1	165.599.280
1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	Baik	2	3.899.000
1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	Baik	1	440.000
1.3.2.01.003.004.002	Portable Generating Set	Baik	2	279.735.000
1.3.2.06.001.001.059	Power Amplifier	Baik	1	6.200.000
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	132	465.427.577
1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	Baik	3	22.300.000
1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	Baik	6	40.736.710
1.3.2.03.002.011.003	Rol Meter	Baik	9	10.646.000
1.3.2.10.002.004.002	Router	Baik	3	1.902.000
1.3.2.10.002.002.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Baik	4	13.898.800
1.3.2.03.003.007.010	Scanner (Universal Tester)	Baik	5	52.179.166
1.3.5.01.001.008.004	Seni Lukis, Ukir	Baik	5	4.000.000
1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Baik	27	422.937.750
1.3.2.10.002.004.001	Server	Baik	6	423.044.850
1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Baik	2	15.880.000
1.3.2.05.002.006.008	Sound System	Baik	2	12.000.000
1.3.2.08.001.012.024	Stabilizer	Baik	1	15.640.000
1.3.2.10.002.004.024	Switch	Baik	3	22.951.350
1.3.2.05.002.005.009	Tabung Gas	Baik	2	3.300.000
1.3.1.01.001.002.003	Tanah Bangunan Gudang	Baik	1	214.605.000

Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah	Nilai
1.3.1.01.001.004.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	2	81.696.000
1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	Baik	2	5.490.000
1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	Baik	1	11.500.000
1.3.2.05.002.006.002	Televisi	Baik	13	49.739.500
1.3.2.06.001.002.045	Tripod Camera	Baik	2	2.960.000
1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	Baik	23	154.154.582
1.3.2.05.001.005.005	White Board	Baik	10	8.800.000
1.3.2.10.002.004.023	Wireless Access Point	Baik	4	11.150.000
1.3.2.10.002.004.022	Wireless PCI Card	Baik	1	467.500
TOTAL				11.854.695.797

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain berfungsi melakukan koordinasi, bimbingan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan penagihan pendapatan daerah, menyusun program dalam rangka pengelolaan keuangan, meningkatkan dan pengembangan pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini telah dibuat strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi :
 1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi secara internal dalam pengelolaan SKPD/unit kerja;
 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompetensi sesuai dengan potensi lokal;
 3. Peningkatan kinerja keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.
- b. Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi :
 1. Memberikan pelatihan terhadap pegawai pemerintahan guna peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalitas kerja;
 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen keuangan daerah;
 3. Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah;
 4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah;
 5. Meningkatkan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;

6. Melaksanakan perencanaan penganggaran berbasis kinerja;
7. Melaksanakan pengendalian belanja berdasarkan dokumen penganggaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Pemerintah Kota Tebing Tinggi, tentunya dihadapkan dengan beberapa tantangan yang terdiri dari permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian dirumuskan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan membandingkan antara kondisi saat ini yang dihadapi dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka dalam rangka tercapainya optimalisasi kinerja yang baik dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, permasalahan yang ada di BPKPD Kota Tebing Tinggi dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur dikarenakan masih sedikitnya program peningkatan kapasitas aparatur/pengembangan pegawai khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Kurangnya konsistensi implementasi reward dan punishment terhadap kinerja aparatur.
- c. Personil yang kurang dan kesempatan mengikuti diklat/ pelatihan pelayanan masih terbatas.
- d. Belum optimalnya Pengelolaan Aset Daerah yang dapat menghambat Pemberdayaan Aset Daerah.
- e. Sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah masih belum maksimal.

1.4. Landasan Hukum

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022.

1.5. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
 - 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2017 – 2022 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Walikota. Rencana strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program dan realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022:

“ Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas ”.

Misi Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022:

“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota pada bulan Mei 2022, untuk program kegiatan dan sub kegiatan selanjutnya masih menggunakan program yang telah ditetapkan Tahun 2022.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu hasil akhir tentang segala sesuatu yang dicapai yang berkorelasi dengan pencapaian visi dan melalui pelaksanaan misi untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dengan standar yang jelas dalam ukuran-ukuran kuantitatif; sasaran merupakan

sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh pemerintah Kota dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan professional;
2. Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, dan Taat Hukum.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Pelayanan Publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.	Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah	-	92	92	95	97

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi mengambil peranan pada misi pertama yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas” . Dalam pencapaian misi, diperlukan sasaran yang baik dan harus memiliki indikator dengan target yang jelas. Perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2017-2022 memuat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya 2 (dua) sasaran strategis.

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Sistem Pemerintah yang Akuntabel, Transparan dan Taat hukum	Opini Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
		Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Bidang Pemerintahan	Nilai IKM	Nilai	97

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dan dalam pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Sistem Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Taat Hukum	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
2.	Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah	Nilai	97

Tabel 4 Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran PAPBD (Rp.)
1.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	Keuangan				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran P APBD (Rp.)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen	2	28.673.600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	41.366.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	9.338.151.694
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya asuransi barang milik daerah	Bulan	12	35.370.681
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	35.625.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	177.611.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	118.325.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku	10	4.024.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	1.253.229.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2	Unit	1	29.192.000
	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	-	-	-

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran P APBD (Rp.)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	431.497.273
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	50.971.314
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pembayaran tenaga jasa surat menyurat kantor	Bulan	12	819.704.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	359.604.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pajaknya	Bulan	12	183.080.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	115.066.100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan	1	152.738.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	1	16.983.700
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	18.933.700
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	32	236.958.200
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	227.520.200
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen	32	4.515.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran PAPBD (Rp.)
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.515.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	38.901.200
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	40.012.400
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	25.108.400
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bulan	32	9.025.000
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	123.773.300
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	32.923.000
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	12	144.719.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persen	100	30.426.700

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran P APBD (Rp.)
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	OPD	8	29.726.800
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersusunnya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen	12	18.550.500
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	OPD	32	123.031.900
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	18	42.354.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	124.650.700
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen	2	79.264.000
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	4.638.300

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran PAPBD (Rp.)
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	8.756.000
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	21.710.800
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	9.895.600
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terbayarnya cicilan pokok dan bunga pinjaman	Bulan	12	409.121.443
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya dana darurat dan mendesak	Bulan	12	1.000.000.000
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Harga	Dokumen	1	141.427.300
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	31.562.400
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	145.146.100
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	1	31.718.800
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	153.931.400
	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	84.999.900
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan	1	83.467.400
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	OPD	32	121.917.600

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran PAPBD (Rp.)
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persen	100	210.772.500
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	SPPT	12625	132.254.200
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	persen	100	149.256.700
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	kegiatan	1	83.665.700
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	persen	100	117.394.700
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	persen	100	29.647.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dimulai dengan pengembangan kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi 2017- 2022. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya. Indikator kinerja yang baik, setidaknya-tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari langsung, obyektif, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini.

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	APBD
		Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai IKM	97	96	98,97	Sangat Tinggi	APBD

Tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
2.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai IKM	95	94,37	99,33	97	96	98,97

Tabel 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RPJMD

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4 / 5 * 100$
1.	Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
2.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai IKM	96	97	98,97

**Tabel 8 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/
Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = 4 / 5 * 100$
1.	Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
2.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai IKM	96	97	98,97

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi juga menghadapi berbagai hal/ faktor yang menghambat pencapaian target indikator kinerja.

Dalam hal ini capaian Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah yang merupakan indikator yang belum mencapai target tahun 2022. Adapun pelayanan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi telah dimaksimalkan dengan menata ruang pelayanan public di MPP serta menyediakan fasilitas pajak secara online. Namun proses pengumpulan data dari responden (Wajib Pajak) masih kurang yang menyebabkan kurang maksimalnya nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah:

- Meningkatkan penyajian laporan keuangan secara bertanggungjawab, transparan, efektif, efisien serta berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- Melakukan pelaporan sesuai dengan tata cara dan tanggung jawab pelaporan sesuai dengan aturan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Kualitas SDM ASN yang melakukan penyusunan laporan keuangan daerah
- Tanggap dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud
- Meningkatnya kualitas proses maupun laporan hasil inventarisasi asset daerah
- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures)
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern

Tabel 9 Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja
2.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai IKM	97	96	98,97	Belum maksimal dalam mengumpulkan hasil respondensi masyarakat terhadap pelayanan publik BPKPD	Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan mengumpulkan lebih banyak hasil respondensi

Tabel 10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (WTP)	100	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Dan Penatausahaan Keuangan Yang Tersusun Dengan Baik	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Opd Yang Menyampaikan Rencana Anggaran Tepat Waktu	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Dan PPAS	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	100	Menunjang
				Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	100	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	Menunjang
				Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD Yang Diverifikasi	100	Menunjang
				Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Yang Diverifikasi	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Dokumen Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	Menunjang
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan Spd	Dokumen Anggaran Kas OPD	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD Yang Menyampaikan Laporan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD Yang Menyampaikan Laporan Posisi Kas Per Bulan	100	Menunjang
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggung jawaban SubKegiatan	Dokumen Penerimaan Dan Pengeluaran Kas	100	Menunjang
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Laporan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100	Menunjang
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya/Bulan	100	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan Pelaksanaan Kerjasama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai/Bulan	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	Persentase Jumlah Ssp Dan Pengeluaran Kas Daerah Yg Valid	100	Menunjang
				Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas Sp2d Dengan Instansi Terkait	Jumlah Opd Yang Melakukan Rekonsiliasi	100	Menunjang
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Menunjang
				Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Cicilan Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Darurat Dan Mendesak	100	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Daerah Sesuai Ketentuan	100	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Bmd Yang Terlaksana	100	Menunjang
				Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Harga	100	Menunjang
				Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Opd Yang Melakukan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
				Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Lkpd	100	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah /Bulan	100	Menunjang
				Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Pembinaan Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan Lo Dan Beban	Jumlah Opd Yang Melakukan Rekonsiliasi	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	100	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	100	Menunjang
				Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Laporan Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	Menunjang
	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai IKM (97)	98,97	Pengelolaan pendapatan daerah	Target pajak daerah	100	Menunjang
				Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase realisasi pbb&Bphtb	100	Menunjang
				Penyuluhan dan penyebar luasan Kebijakan pajak daerah	Persentase realisasi Bphtb	100	Menunjang
				Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Persentase Jumlah Sppt yang dibagikan	100	Menunjang
				Pembinaan Dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Persentase peningkatan jumlah wp	100	Menunjang
					Persentase Jumlah transaksi pembayaran online	100	Menunjang
				Pengelolaan pendapatan daerah	Target pajak daerah	100	Menunjang
				Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Jumlah transaksi pembayaran online	100	Menunjang
					Persentase realisasi Pajak Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Persentase Realisaasi pajak	100	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan basis Data pajak daerah	Persentase Jumla htransaksi pembayaran online	100	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Realisasi pajak daerah	100	Menunjang
				Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /Kota	Nilai ikm pelayanan pajak daerah	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, Dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	Menunjang
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Dokumen perencanaan	100	Menunjang
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Kinerja Dan keuangan	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Menunjang
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan proses administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Menunjang
				Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dihasilkan	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Buku	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Untuk Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	100	Menunjang
				Pengadaan Mebel	Jumlah Bulan Pengadaan Mebel	100	Menunjang
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100	Menunjang
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Untuk Kendaraan Dinas	100	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100	Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Lainnya	100	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran diperlukan program dan kegiatan yang baik secara perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatandan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
01.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	Keuangan	17.517.409.605	15.617.253.998	89,15
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.174.232.762	12.384.286.916	94,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.039.700	67.908.000	96,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.673.600	27.671.900	96,51
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.366.100	40.236.100	97,27
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.338.151.694	8.748.929.077	93,69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.338.151.694	8.748.929.077	93,69
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.370.681	32.837.140	92,84
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.370.681	32.837.140	92,84
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.588.817.000	1.561.112.095	98,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.625.900	35.558.500	99,81
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.611.700	164.755.500	92,76
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118.325.600	106.318.000	89,85
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.024.800	3.393.000	84,30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.253.229.000	1.251.087.095	99,83
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511.660.587	493.499.425	96,45
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.192.000	28.688.000	98,27
	Pengadaan Mebel		0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	431.497.273	416.913.600	96,62
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.971.314	47.897.825	93,97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.179.308.800	1.098.455.849	93,14
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	819.704.400	800.797.900	97,69

No	Program, Kegiatandan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.604.400	297.657.949	82,77
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.884.300	381.545.330	84,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.080.200	135.387.730	73,95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.066.100	97.755.600	84,96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.738.000	148.402.000	97,16
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.826.015.143	1.902.701.858	67,33
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	588.339.400	556.673.096	94,62
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	16.983.700	16.473.638	97,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	18.933.700	18.177.298	96,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	236.958.200	219.871.300	92,79
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	227.520.200	220.191.300	96,78
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.515.000	4.508.900	99,86
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.515.000	4.499.550	99,66
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	38.901.200	35.543.875	91,37
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	40.012.400	37.407.235	93,49
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	395.702.500	280.818.800	70,97
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	25.108.400	20.278.550	80,76
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9.025.000	8.998.550	99,71
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	123.773.300	122.281.100	98,79
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	32.923.000	31.443.250	95,51
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	144.719.300	49.130.300	33,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.426.700	25.358.450	83,34
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.726.800	23.328.600	78,48
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		0	-

No	Program, Kegiatandan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		0	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	432.851.800	317.361.800	73,32
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18.550.500	15.961.700	86,04
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	123.031.900	93.082.900	75,66
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42.354.000	18.988.400	44,83
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	124.650.700	104.891.500	84,15
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	79.264.000	73.342.800	92,53
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.638.300	2.229.500	48,07
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	8.756.000	1.293.000	14,77
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	21.710.800	1.635.000	7,53
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	9.895.600	5.937.000	60,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.409.121.443	747.848.162	53,07
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	409.121.443	409.121.443	100,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	338.726.719	33,87
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	794.170.900	710.344.924	89,44
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	794.170.900	710.344.924	89,44
	Penyusunan Standar Harga	141.427.300	137.635.700	97,32
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	31.562.400	27.062.400	85,74
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	145.146.100	143.621.100	98,95
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	31.718.800	29.666.800	93,53
	Pengamanan Barang Milik Daerah	153.931.400	142.339.020	92,47
	Penilaian Barang Milik Daerah	84.999.900	49.299.900	58,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	83.467.400	59.230.404	70,96
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	121.917.600	121.489.600	99,65
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	-
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	722.990.800	619.920.300	85,74
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	722.990.800	619.920.300	85,74

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	210.772.500	202.382.500	96,02
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	132.254.200	86.605.000	65,48
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	149.256.700	130.998.000	87,77
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	83.665.700	80.125.800	95,77
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	117.394.700	97.647.000	83,18
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	29.647.000	22.162.000	74,75

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada masing masing sub kegiatan berdasarkan indikator kinerja tahun 2022 yaitu:

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Dalam pencapaian indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan telah dilakukan dengan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, penatausahaan keuangan daerah dengan aplikasi berbasis online dan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan dokumen anggaran DPPA Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 3.620.186.043,00 atau sebesar 20,67% dari total anggaran DPPA 2022. (Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah). Realisasi belanja program dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mendukung Opini BPK terhadap Laporan Keuangan yaitu Rp 2.613.046.782,00,-

b. Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah

Dalam pencapaian indikator Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah telah dilakukan dengan pelaksanaan sub kegiatan rutin pelayanan kantor, penyuluhan kebijakan pajak daerah, pelayanan konsultasi pajak daerah serta pemeriksaan pengawasan pajak daerah.

Sesuai dengan dokumen anggaran DPPA Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 13.897.223.562,00 atau sebesar 79,33% dari total anggaran DPPA 2022 (Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah). Realisasi belanja program dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mendukung indikator Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah yaitu Rp 13.004.200.716,-

Tabel 12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Sistem Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Taat Hukum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (WTP)			3.620.186.043,00	2.613.046.782,00	72,18	27,82
2.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai IKM (97)	96	98,97	13.897.223.562,00	13.004.200.716	93,57	6,43

Tabel 13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	Keuangan				17.517.409.605	15.617.253.998	89,15	10,85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.174.232.762	12.384.286.916	94,00	6,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.039.700	67.908.000	96,96	3,04
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	100	28.673.600	27.671.900	96,51	3,49
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	100	41.366.100	40.236.100	97,27	2,73
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.338.151.694	8.748.929.077	93,69	6,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	100	9.338.151.694	8.748.929.077	93,69	6,31
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				35.370.681	32.837.140	92,84	7,16
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	100	35.370.681	32.837.140	92,84	7,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.588.817.000	1.561.112.095	98,26	1,74

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100	35.625.900	35.558.500	99,81	0,19
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	100	177.611.700	164.755.500	92,76	7,24
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	100	118.325.600	106.318.000	89,85	10,15
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku	10	100	4.024.800	3.393.000	84,30	15,70
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	100	1.253.229.000	1.251.087.095	99,83	0,17
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				511.660.587	493.499.425	96,45	3,55
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	100	29.192.000	28.688.000	98,27	1,73
	Pengadaan Mebel	-	-			0	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	100	431.497.273	416.913.600	96,62	3,38
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	100	50.971.314	47.897.825	93,97	6,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.179.308.800	1.098.455.849	93,14	6,86
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	100	819.704.400	800.797.900	97,69	2,31
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	100	359.604.400	297.657.949	82,77	17,23
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				450.884.300	381.545.330	84,62	15,38
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	100	183.080.200	135.387.730	73,95	26,05
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	100	115.066.100	97.755.600	84,96	15,04
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan	1	100	152.738.000	148.402.000	97,16	2,84
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				2.826.015.143	1.902.701.858	67,33	32,67
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				588.339.400	556.673.096	94,62	5,38
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	1	100	16.983.700	16.473.638	97,00	3,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	100	18.933.700	18.177.298	96,00	4,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	32	100	236.958.200	219.871.300	92,79	7,21
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	100	227.520.200	220.191.300	96,78	3,22
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen	32	100	4.515.000	4.508.900	99,86	0,14
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	100	4.515.000	4.499.550	99,66	0,34
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	100	38.901.200	35.543.875	91,37	8,63

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Realisasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	100	40.012.400	37.407.235	93,49	6,51
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				395.702.500	280.818.800	70,97	29,03
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	100	25.108.400	20.278.550	80,76	19,24
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bulan	32	100	9.025.000	8.998.550	99,71	0,29
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	100	123.773.300	122.281.100	98,79	1,21
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	100	32.923.000	31.443.250	95,51	4,49
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	12	100	144.719.300	49.130.300	33,95	66,05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persen	100	100	30.426.700	25.358.450	83,34	16,66
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	OPD	8	100	29.726.800	23.328.600	78,48	21,52
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-			0	-	-
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-			0	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				432.851.800	317.361.800	73,32	26,68
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen	12	100	18.550.500	15.961.700	86,04	13,96
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	OPD	32	100	123.031.900	93.082.900	75,66	24,34
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	18	100	42.354.000	18.988.400	44,83	55,17
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	100	124.650.700	104.891.500	84,15	15,85

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen	2	100	79.264.000	73.342.800	92,53	7,47
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	100	4.638.300	2.229.500	48,07	51,93
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	100	8.756.000	1.293.000	14,77	85,23
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	100	21.710.800	1.635.000	7,53	92,47
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100	9.895.600	5.937.000	60,00	40,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.409.121.443	747.848.162	53,07	46,93
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Bulan	12	100	409.121.443	409.121.443	100,00	0,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bulan	12	100	1.000.000.000	338.726.719	33,87	66,13
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				794.170.900	710.344.924	89,44	10,56
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				794.170.900	710.344.924	89,44	10,56
	Penyusunan Standar Harga	Dokumen	1	100	141.427.300	137.635.700	97,32	2,68
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	100	31.562.400	27.062.400	85,74	14,26
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	100	145.146.100	143.621.100	98,95	1,05
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	1	100	31.718.800	29.666.800	93,53	6,47
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	100	153.931.400	142.339.020	92,47	7,53
	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	100	84.999.900	49.299.900	58,00	42,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan	1	100	83.467.400	59.230.404	70,96	29,04
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	OPD	32	100	121.917.600	121.489.600	99,65	0,35
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0	0	-	-
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				722.990.800	619.920.300	85,74	14,26
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				722.990.800	619.920.300	85,74	14,26
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persen	100	100	210.772.500	202.382.500	96,02	3,98
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	SPPT	12625	100	132.254.200	86.605.000	65,48	34,52
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	persen	100	100	149.256.700	130.998.000	87,77	12,23
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	kegiatan	1	100	83.665.700	80.125.800	95,77	4,23
	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	persen	100	100	117.394.700	97.647.000	83,18	16,82
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	persen	100	100	29.647.000	22.162.000	74,75	25,25

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholder* sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan baik Belanja Tidak Langsung Langsung maupun Belanja Langsung Tahun anggaran 2022.

Secara internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga kontribusi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Kami menyadari bahwa hasil laporan ini belum sempurna dan di sana sini masih ada kesalahan, Kami mohon kritik dan saran yang membangun. Semoga ditahun mendatang pembuatan laporan ini khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi semakin lebih baik lagi.

Tebing Tinggi, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

**SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730719 199311 1 001**

LAMPIRAN :